

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan menempati posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia sekaligus menentukan arah kemajuan bangsa. Pendidikan adalah proses yang dirancang secara sadar dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara utuh, mencakup kemampuan intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan juga berfungsi sebagai proses memanusiakan manusia melalui pembentukan karakter, penanaman nilai, serta penguatan tanggung jawab sosial. Arah penyelenggaraan pendidikan menuntut keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan moral, sehingga mampu menghasilkan individu yang cerdas, berkarakter, dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Urgensi pendidikan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.² Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Pemaknaan tersebut mencakup seluruh individu tanpa memandang status, agama, suku, ras, atau kelompok tertentu, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang beragam.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki perbedaan dari kondisi rata-rata anak umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosial. Perbedaan dapat berupa kelebihan atau keterbatasan. Perbedaan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus

¹ Sari, N. (2025). Pengertian Pendidikan. *Dasar-Dasar Pendidikan*, 3.

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diakses 21 April 2026, dari <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>

umumnya memerlukan pendidikan dan layanan khusus sesuai dengan kondisi masing-masing anak.³ Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Melalui proses pendidikan, berbagai kemampuan yang dimiliki anak dapat dikenali, dipelajari dan selanjutnya dikembangkan menjadi keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terlebih karena tidak sedikit anak berkebutuhan khusus memiliki potensi atau bakat tertentu yang tidak selalu dimiliki oleh anak pada umumnya. Selain itu, pendidikan juga berkontribusi dalam membentuk sikap disiplin dan kemandirian, sehingga anak tidak selalu bergantung pada orang lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari.⁴

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁵ Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang layak pada seluruh jenis, jenjang dan jalur pendidikan.⁶ Kebijakan tersebut selaras dengan kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya pada tujuan keempat yang bertujuan menjamin pendidikan yang merata dan berkualitas.⁷ Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pendidikan untuk semua.

Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus umumnya diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar biasa. Layanan tersebut mencakup beberapa jenjang pendidikan, dimulai dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

³ Saputri, M. A., Widiyanti, N., Lestari, S. A., & Hasanah, U. (2023). Ragam Anak Berkebutuhan Khusus. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 38-53.

⁴ Halidu, S. (2022). *Pendidikan anak berkebutuhan khusus*. Penerbit P4i.

⁵ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁶ Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

⁷ United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Diakses 21 April 2026, dari <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1>

dengan masa belajar sekurang-kurangnya enam tahun. Setelah itu, peserta didik dapat melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) yang ditempuh selama minimal tiga tahun, kemudian ke Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dengan durasi pendidikan tiga tahun. Selain itu, terdapat pula Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) sebagai tahap awal pendidikan bagi anak difabel, dengan lama pendidikan berkisar antara satu hingga tiga tahun.⁸

Namun, saat ini jumlah dan persebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) belum sepenuhnya merata di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi. Data referensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa Kota Bekasi mengalami keterbatasan dalam ketersediaan SLB, sehingga tidak semua anak berkebutuhan khusus memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Berikut data terkait jumlah dan persebaran SLB di Kota Bekasi pada tiap kecamatan.⁹

Tabel 1 Jumlah SLB Kota Bekasi

No	Kecamatan	TKLB	SDLB	SMPLB	SMLB	Total
1	Pondokgede	0	3	3	3	9
2	Jatiasih	0	0	0	0	0
3	Bantargebang	0	0	0	0	0
4	Bekasi Timur	0	2	2	2	6
5	Bekasi Selatan	0	3	3	3	9
6	Bekasi Barat	0	1	1	0	2
7	Bekasi Utara	0	0	0	0	0
8	Jati Sampurna	0	0	0	0	0
9	Medan Satria	1	1	1	1	4
10	Rawalumbu	1	1	1	1	4
11	Mustika Jaya	0	0	0	0	0
12	Pondok Melati	0	0	0	0	0

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. (1991). Diakses 21 April 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/58418>

⁹ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, *Data program pendidikan sekolah luar biasa (SLB)*, diakses 21 April 2026, <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/program/slb/026500/2/all>

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kecamatan di Kota Bekasi yang belum memiliki SLB, seperti Jatiasih, Bantargebang, Bekasi Utara, Jati Sampurna, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, sementara kecamatan lain seperti Bekasi Selatan dan Pondokgede memiliki jumlah SLB lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran SLB di Kota Bekasi belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan.

Sebagai upaya mengaktualisasikan kesetaraan hak belajar bagi semua anak tanpa memandang perbedaan khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, pemerintah mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang bersifat inovatif dan strategis dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi diartikan sebagai sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama di satu lingkungan, dengan tetap memperhatikan keberagaman karakteristik dan kebutuhan individual peserta didik.

Dalam implementasinya, pendidikan inklusi diwujudkan melalui sekolah inklusi, yaitu sekolah reguler yang menerapkan model campuran atau mengkombinasikan berbagai keberagaman baik dari segi agama, suku, ras, budaya dan perbedaan kondisi fisik, mental maupun karakteristik. Kebijakan mengenai pendidikan inklusi telah dituangkan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 yang mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif pada sekurang-kurangnya 4 sekolah, yang mencakup jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.¹⁰

Pada jenjang SMA, keberadaan sekolah inklusi menjadi bagian penting dalam menentukan keberlanjutan studi bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Di Kota Bekasi, penyelenggaraan SMA inklusi telah berkembang seiring dengan upaya pemenuhan kebijakan tersebut. Berdasarkan data yang bersumber dari sistem referensi Kemendikbudristek, berikut disajikan daftar

¹⁰ Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi pada lembaga pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339-348.

SMA inklusi di Kota Bekasi beserta jumlah PDBK yang terdaftar pada tahun 2025.¹¹

Tabel 2 Jumlah SMA Inklusi Kota Bekasi

No	Nama Kecamatan	Jumlah SMA	Jumlah SMA Inklusi	Nama Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
1	Pondokgede	8	1	SMA Negeri 21 Kota Bekasi	570	1
2	Jatiasih	14	4	SMAS Malidar	13	1
				SMAN 6 Bekasi	772	1
				SMAS Tulus Bhakti	452	1
				SMAS ST Bellarminus	68	1
3	Bantargebang	2	1	SMAN 15 Bekasi	887	1
4	Bekasi Timur	14	1	SMAN 1 Bekasi	985	4
5	Bekasi Selatan	14	5	SMAN 8 Bekasi	895	1
				SMAN 17 Bekasi	817	1
				SMAS Tunas Jaka Sampurna	85	1

¹¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Data asesmen peserta didik berkebutuhan khusus wilayah SMA*, diakses 21 April 2026, https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/berkebutuhan_khusus/asesmen/wilayah/026500/2?jenjang=dikmen&bentuk=SMA

				SMAN 2 Bekasi	1.200	1
				SMAS Islam Darusalem	279	3
6	Bekasi Barat	9	2	SMAS Metropolitan	40	1
				SMA Royal Wells High School	6	4
7	Bekasi Utara	14	2	SMAN 4 Bekasi	950	3
				SMA Kristen Penabur Summarecon Bekasi	352	1
8	Jati Sampurna	8	1	SMA Inklusi School of Human	87	13
9	Medan Satria	11	3	SMAS Taman Harapan 1	156	1
				SMAS Pangeran Jayakarta	76	1
				SMAN 10 Bekasi	872	2
10	Rawalumbu	10	4	SMAN 13 Bekasi	852	2
				SMA Alexandria Islamic School	215	2

				SMAS Marsudirini	611	1
				SMAS Taman Siswa Bekasi	11	2

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa SMA inklusi di Kota Bekasi telah tersebar di beberapa kecamatan, namun belum merata. Kecamatan Bekasi Selatan memiliki jumlah terbanyak yaitu 5 sekolah, diikuti Jatiasih dan Rawalumbu masing-masing 4 sekolah, sementara beberapa kecamatan lain seperti Pondokgede, Bantargebang, Bekasi Timur, dan Jati Sampurna hanya memiliki 1 sekolah inklusi. Dari sisi jumlah PDBK, sebagian besar sekolah masih melayani 1-2 siswa, sedangkan beberapa sekolah memiliki jumlah lebih tinggi, seperti SMAN 1 Bekasi dan SMA Royal Wells High School masing-masing 4 siswa. SMA Inklusi School of Human di Kecamatan Jati Sampurna tercatat memiliki jumlah tertinggi, yaitu 13 siswa dari total 87 peserta didik, yang menunjukkan kapasitas dan komitmen layanan inklusi yang lebih besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pendidikan inklusi telah berjalan, pemerataan akses layanan masih perlu ditingkatkan agar seluruh PDBK di Kota Bekasi dapat memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi tidak terlepas dari peran kurikulum sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan inklusi, implementasi kurikulum menjadi tantangan besar karena keberagaman kebutuhan peserta didik yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang adaptif. Salah satu strateginya adalah kurikulum berbasis diferensiasi. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan minat peserta didik dalam satu lingkungan belajar.¹²

Namun demikian, implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di sekolah masih menghadapi berbagai hambatan. Satu diantara

¹² Trisia, D., & Meilana, S. F. (2025). Pengembangan kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 1087.

permasalahan yang cukup sering ditemukan adalah belum optimalnya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan PDBK. Dalam banyak kasus, kurikulum yang digunakan di sekolah masih cenderung mengacu pada kurikulum reguler tanpa adanya adaptasi yang memadai.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Andriyan yang menunjukkan bahwa sistem kurikulum di sekolah inklusi masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus.¹³ Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian Alfazuri yang menunjukkan bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurangnya fleksibilitas dalam kurikulum dan metode yang digunakan.¹⁴ Selain itu, hasil penelitian Mustika, juga menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah belum sepenuhnya responsif terhadap kemampuan dan latar belakang siswa.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kurikulum perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi agar mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam.

Salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi adalah SMA School of Human. Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa SMA School of Human memiliki jumlah PDBK terbanyak dibandingkan sekolah inklusi lainnya di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan peneliti, saat ini terdapat 20 PDBK dengan karakteristik dan kebutuhan belajar yang beragam. Kondisi tersebut mendorong sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi sebagai bentuk penyesuaian layanan pendidikan agar proses pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan individual setiap peserta didik.

Implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human dilakukan melalui penyesuaian materi, metode, media, serta evaluasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan, kesiapan belajar, dan

¹³ Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2023). Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94.

¹⁴ Alfazuri, N., Maharani, S., Erlita, S., Pratiwi, I., Amalia, A. N., & Setiawan, D. (2025). Problematika Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SDN Jatisari Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 1702

¹⁵ Mustika, D., Assyifa, A., & Rahmawati, S. (2025). Evaluasi Kurikulum Sekolah Dasar Dalam Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 438-441.

karakteristik PDBK. Dalam pelaksanaannya, guru tidak menerapkan pembelajaran yang seragam, melainkan memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel melalui modifikasi tugas, penyederhanaan materi tertentu, penggunaan metode belajar yang variatif, serta bentuk penilaian belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, SMA School of Human juga mengembangkan program pendukung berupa layanan terapi yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan inklusi di sekolah. Layanan terapi ditangani langsung oleh terapis internal sekolah dan dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen awal PDBK. Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan peneliti di beberapa SMA inklusi di wilayah Bekasi, diketahui bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki program terapi yang terintegrasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Layanan yang diberikan umumnya masih berfokus pada pembelajaran di kelas tanpa adanya pendampingan terapi secara langsung dari pihak sekolah. Berbeda dengan sekolah lainnya, SMA School of Human memiliki program terapi yang ditangani secara langsung oleh terapis internal sekolah sebagai bagian dari layanan bagi PDBK.

Keberadaan layanan terapi ini menjadi salah satu bentuk implementasi diferensiasi karena intervensi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, hambatan, dan perkembangan masing-masing peserta didik. Layanan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif, sosial, emosional, komunikasi, perilaku, serta kemandirian peserta didik. Melalui penyesuaian kurikulum dan pemberian layanan terapi yang adaptif, sekolah berupaya menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang mampu mendukung perkembangan PDBK sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing.

Komitmen SMA School of Human terhadap layanan pendidikan inklusi yang berkualitas diakui melalui perolehan penghargaan *Global Special Education Teacher (GSET) Inclusion Award 2025* tingkat nasional yang diselenggarakan oleh *LSPR Institute of Communication and Business* melalui *LSPR School of Special Needs Education*. Penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan *The 1st Global Special Education Teacher (GSET)*

Forum 2025 yang dilaksanakan pada 9 Mei 2025 di Jakarta. Penghargaan ini secara khusus diberikan kepada sekolah yang menunjukkan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dalam konteks ini, SMA School of Human termasuk satu diantara dua belas sekolah penerima penghargaan sekaligus merupakan satu-satunya sekolah yang berasal dari Kota Bekasi. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sekolah ini telah diakui sebagai salah satu *role model* dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia.¹⁶

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi berjalan di SMA School of Human, diperlukan suatu evaluasi yang dapat melihat secara menyeluruh. Evaluasi kurikulum merupakan proses penilaian yang ditujukan pada kurikulum itu sendiri sebagai suatu sistem (nilai intrinsik). Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai setelah kurikulum diimplementasikan. Selain itu, evaluasi juga bertujuan menilai ketepatan dan relevansi tujuan kurikulum, termasuk kesesuaiannya dengan tingkat kemampuan atau kecerdasan peserta didik. Di samping itu, evaluasi digunakan untuk mengkaji apakah metode pembelajaran yang diterapkan sudah efektif dalam mencapai tujuan, serta apakah materi yang disusun benar-benar mendukung pencapaian tujuan kurikulum dan pembelajaran.¹⁷ Salah satu model evaluasi yang dapat digunakan adalah model *Context, Input, Process, Product* (CIPP).

Model evaluasi CIPP merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini mengkaji empat dimensi utama, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Kegiatan evaluasi menjelaskan evaluasi model CIPP berorientasi pada keputusan untuk melakukan peningkatan atau perbaikan, bukan membuktikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model ini efektif diterapkan dalam evaluasi di bidang pendidikan, termasuk kurikulum. Model CIPP juga memiliki manfaat menawarkan format penilaian yang menyeluruh pada setiap tahap evaluasi tersebut.¹⁸

¹⁶ LSPR Institute. (2025). *LSPR SSNE berikan GSET Inclusion Award 2025*. Diakses 21 April 2026, <https://www.lspr.ac.id/lspr-ssne-berikan-penghargaan-gset-inclusion-award-2025/>

¹⁷ Nasarudin, N., & Syafii, A. H. (2022). Evaluasi Kurikulum Madrasah Inklusi pada Era Kenormalan Baru. *INKLUSI*, 9(1), 99-124.

¹⁸ Agustin, R. (2024). Evaluasi kurikulum merdeka menggunakan model cipp pada sekolah dasar. *Cendekia Pendidikan*, 3(1), 19-29.

Meskipun model evaluasi CIPP telah banyak digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan, termasuk dalam evaluasi kurikulum, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks pendidikan umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasinya dalam pendidikan inklusi. Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek efektivitas kurikulum secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan antar komponen kurikulum dalam mengakomodasi kebutuhan PDBK. Masih terdapat celah penelitian yang terletak pada belum optimalnya kajian yang mengkaji evaluasi implementasi kurikulum berbasis diferensiasi dalam pendidikan inklusi dengan menggunakan model CIPP secara komprehensif, khususnya pada jenjang SMA. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi kurikulum di SMA School of Human, termasuk keterkaitannya dengan program terapi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan inklusi.

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human dengan model evaluasi CIPP penting untuk dilakukan agar memperoleh gambaran evaluatif secara menyeluruh mengenai kualitas pelaksanaan kurikulum dalam mengakomodasi kebutuhan PDBK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kurikulum pendidikan inklusi, khususnya yang menggunakan pendekatan model CIPP. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi berbasis temuan empiris yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan implementasi kurikulum yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, baik di SMA School of Human maupun di satuan pendidikan inklusi lainnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Evaluasi Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi Berbasis Diferensiasi di SMA School of Human”, dengan sub fokus berikut:

1. Evaluasi konteks (*context*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human.
2. Evaluasi masukan (*input*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human.
3. Evaluasi proses (*process*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human.
4. Evaluasi produk (*product*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human.

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana evaluasi konteks (*context*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human?
2. Bagaimana evaluasi masukan (*input*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human?
3. Bagaimana evaluasi proses (*process*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human?
4. Bagaimana evaluasi produk (*product*) implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human?

C. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi di SMA School of Human berdasarkan komponen *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product* (CIPP).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian evaluasi kurikulum pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan inklusi yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Selain itu, penelitian ini memperkuat penerapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dalam mengevaluasi implementasi kurikulum berbasis diferensiasi pada satuan pendidikan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model evaluasi kurikulum yang lebih adaptif dan inklusif, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji evaluasi pendidikan inklusi dengan pendekatan evaluatif.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan peneliti serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di bidang Manajemen Pendidikan, khususnya mengenai kurikulum pendidikan.

b. Bagi SMA School of Human

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran evaluatif mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi berbasis diferensiasi, khususnya pada aspek konteks, kesiapan *input*, proses pembelajaran, serta capaian perkembangan PDBK. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi dalam upaya penyempurnaan implementasi kurikulum serta peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian evaluasi kurikulum pendidikan, khususnya yang menggunakan model CIPP dalam konteks pendidikan inklusi.